



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUYONO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR I**
3. NHK : **180669**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.230.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/150 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah Seluas 186 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 186 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m²/28.5 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 139.900.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 150.000.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 625.180.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.145.080.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.145.080.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.